

## **PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGUATAN POLITIK IDENTITAS KOMUNAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI MESIR**

### **The Role Of Social Media In Accentuating The Politics Of Communal Identity In Egypt's General Elections**

دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز سياسة الهوية المجتمعية

\*\*\*\*\* Mahmud Hamzawi Fahim محمود حمزاوي فهيم \*\*\*\*\*

Media sosial ( sebagai aplikasi teknologi komputer dan smartphones yang memfasilitasi bagi-bagi informasi dan antar komunitas-komunitas virtual melalui jaringan internet) dalam dasawarsa terakhir ini sampai 2017 telah berhasil menjadi salah satu dari minat utama para pengguna internet. Di antara media sosial yang bersifat multi-guna adalah: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, WhatsApp, Viber, Skype, dll.

- Media sosial merupakan faktor utama dalam penyulutan revolusi Arab Spring yang mulai dari Tunisia tahun 2010 dan kemudian Mesir tahun 2011.
- Korupsi, Autoritarianisme, dan Politik Dinasti adalah hal-hal yang paling utama yang menimbulkan semangat perubahan sehingga revolusi terjadi terhadap rezim Husni Mubarak.
- Setelah lengsernya Presiden Husni Mubarak, masa pemerintahan transisi dimandatkan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata di bawah Marshal Muhammad Husain Thantawi sampai diselenggarakannya Pemilu tahun 2012. Pada masa transisi itu, partai rezim Husni Mubarak yaitu National Democratic Party dibubarkan dan jumlah partai politik naik hingga puluhan partai dengan dua haluan utama nasionalis-sekuler (seperti Partai Al-Karamah, Partai Al-Mishriyun Al-Ahrar, Partai Al-Wafd Al-Jadid, Partai Al-Ghad, Partai Ad-Dustur, Partai Mishr Al-Hurriyah) dan islami (seperti Partai Al-Hurriyah Wal Adalah, Partai An-Nur, Partai Al-Wasath). Persaingan politik antara kedua kubu tersebut memuncak pada Pemilu 2012 yang dimenangkan oleh Partai Al-Hurriyah Wal

Adalah/Partai Kebebasan dan Keadilan (partai Islam besutan Ormas Al-Ikhwanul Muslimun, yang kemudian menang juga dalam Pilpres dengan Capresnya Muhammad Mursi. Muhammad Mursi membentuk kabinet baru dan angkat Jenderal Abdel-Fattah El-Sisi, sebagai menteri pertahanan. Pemerintah Mursi tidak harmonis dengan Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata dan juga tampak seperti tidak menghargai kemajmukan sosial dan berambisi menjadikan syariah sebagai dasar negara. Di samping itu, kondisi keamanan dan ekonomi tidak tampak membaik, sehingga muncul gerakan pemberontakan yang dimotori oleh Militer sehingga akhirnya Presiden Mursi digulingkan oleh Abdul-Fattah El-Sisi pada tahun 2013 dan bahkan Ormas Al-Ikhwanul Muslimun beserta Partai Kebebasan dan Keadilan dibubarkan dan dilarang.

- Media sosial merupakan salah satu faktor utama di balik menang dan kalahnya Islam Politik di Mesir. Hal ini hampir sama dengan kondisi di Indonesia kini, yaitu Pilkada Jakarta 2017, yang mana media sosial merupakan salah satu faktor utama di balik menangnya kandidat yang berhaluan islami.
- Militer Mesir beserta bekas-bekas rezim Mubarak berhasil memanfaatkan kelemahan serta konflik partai politik serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Presiden Muhammad Mursi (dari partai Islam besutan Ormas Al-Ikhwanul Muslimun, yaitu Hizbul Hurriyah Wal Adalah/Partai Kebebasan dan Keadilan, yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu tahun 2012) untuk mencitrakan diri menjadi juru selamat sehingga akhirnya Jenderal Abdelfattah El-Sisi dipilih menjadi presiden pada tahun 2014. Media sosial terutama Facebook, Twitter, Youtube, dan WhatsApp dimanfaatkan secara maksimal oleh Militer Mesir untuk mendelegitimasi pemerintahan Presiden Muhammad Mursi.
- Pemerintah militer El-Sisi menjadikan masalah keamanan negara sebagai landasan untuk kembali menjadi otoriter bahkan lebih otoriter daripada rezim Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat, dan Husni Mubarak. Pembubaran serta pelarangan terhadap Partai Kebebasan dan Keadilan serta Ikhwanul Muslimin salah

satu bentuk represif dari rezim El-Sisi. Kini Pemerintah El-Sisi semakin solid dan didukung oleh Pemerintah Donald Trump.

- Kegagalan Pemerintah El-Sisi dalam bidang ekonomi dapat menimbulkan semangat revolusi baru. Hal ini sedang dimanfaatkan oleh kubu Islam Politik yang kalah di kancah politik dengan menggunakan media sosial secara maksimal untuk memunculkan ketidakpuasan dan pemberontakan terhadap rezim militer itu.
- Kini polarisasi persaingan politik di Mesir mengerucut menjadi antara kubu militer dan kubu Islam Politik dan Reformis. Masing-masing memaksimalkan penggunaan media sosial (terutama Facebook, Youtube, dan WhatsApp) untuk mencitrakan diri dan mendiskreditkan lawannya. Namun, keadaan di lapangan menjadikan masyarakat awam gerah dengan kinerja rezim militer sehingga rata-rata masyarakat awam tidak lagi senang dengan rezim tersebut. Hal itu membuat kelompok Islam Politik dan kelompok Reformis berharap mereka bisa memobilisasi masyarakat untuk menghasilkan reformasi politik. Nampaknya kubu Islamis dan kubu Reformis sudah siap untuk bekerja sama daripada bersaing, karena mereka sudah dapat pelajaran berharga bahwa persaingan dapat dimanfaatkan oleh militer untuk mempertahankan kekuasaannya.
- Revolusi Anti-Mubarak (atau Revolusi Tahrir Square tahun 2011) gagal mencapai tujuan utamanya yakni menghasilkan pemerintahan sipil demokratis karena konflik internal antara semua organisasi politik dan sosial terutama konflik antara haluan sekuler dan haluan islami.
- Semua partai politik dan ormas Mesir perlu dapat pelajaran dari kegagalan mereka untuk memenuhi cita-cita rakyat untuk menciptakan sistem politik yang sipil demokratis dan kemajuan ekonomi sosial.
- Pencitraan melalui media sosial tidak akan berhasil kecuali dengan kerja nyata di lapangan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang tidak lagi percaya pada janji-janji manis.